

**EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 (STUDI  
KASUS : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015)**

OCTAVIANI ERINITA PURNAMASARI TAMATUR

Program Studi S1 Akuntansi,Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Mercubuana

E-mail : [Octhavianierin@gmail.com](mailto:Octhavianierin@gmail.com)

**ABSTRAK**

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang wajib disampaikan oleh setiap entitas pemerintahan. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban APBN/APBD tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2015 telah melaksanakan laporan keuangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Untuk mengetahui apakah laporan keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan data laporan keuangan tahun 2015 Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil pengumpulan dan pembahasan, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah diterapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kata Kunci : Penerapan Akuntansi, Laporan Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

**EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 (STUDI  
KASUS : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015)**

OCTAVIANI ERINITA PURNAMASARI TAMATUR

**ABSTRAK**

*The financial report is a form of responsibility for the implementation of the State Budget (APBN) / Budget (APBD) which must be submitted by any government entity. The form and content of the accountability report APBN / APBD are prepared and presented in accordance with government accounting standards. Government accounting standards are principles applied in preparing and presenting the financial statements of the government stipulated in Government Regulation No. 71 Year 2010.*

*The purpose of this study was to determine whether the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in 2015 has carried out its financial statements based on Government Regulation No. 71 Year 2010.*

*To determine whether the financial statements of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia which consists of budget realization reports, balance sheets, and notes to the financial statements have been applied in accordance with Government Regulation No. 71 Year 2010, the research method used is descriptive method by using financial statement data 2015 Ministry Finance of the Republic of Indonesia.*

*Based on the results of the collection and discussion, the results showed that the budget realization reports, balance sheets, and notes to the financial statements of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia has been implemented according to Government Regulation No. 71 Year 2010.*

*Keywords:* Implementation of accounting, financial reporting, government regulation number 71 in 2010